	Universitas Negeri Surabaya S1 Ilmu Administrasi Negara	Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Pengembangan Program Desa			3		21 Oktober 2026

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
	WILDA SUMARSYAH	EVA HANY FANIDA	EVA HANY FANIDA

Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah Pengembangan Program Desa (3 SKS) pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip, tata kelola, dan teknik perancangan pembangunan di tingkat desa sebagai bagian integral dari penguatan administrasi publik di tingkat lokal. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan kemampuan analitis dan praktis dalam merancang, mengimplementasikan, serta mengevaluasi program pemberdayaan dan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan berkelanjutan. Ruang lingkup materi mencakup kerangka regulasi pemerintahan desa, perencanaan strategis (RPJM Desa dan RKP Desa), pengelolaan keuangan desa, pemanfaatan potensi lokal melalui BUMDes, hingga evaluasi dampak kebijakan desa. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan *student-centered learning* melalui kombinasi metode kuliah interaktif, diskusi kelompok, analisis studi kasus, dan pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) guna menghubungkan teori administrasi negara dengan paktik tata kelola desa secara nyata.

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL-1	Mampu menunjukkan nilai-nilai agama, kebangsaan dan budaya nasional, serta etika akademik dalam melaksanakan tugasnya
CPL-2	Menunjukkan karakter tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat, dan berjiwa kewirausahaan
CPL-3	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan
CPL-4	Mengembangkan diri secara berkelanjutan dan berkolaborasi.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK-1	Mampu menginternalisasi nilai-nilai keagamaan, kebangsaan, dan kearifan lokal dalam merencanakan program pembangunan desa secara partisipatif dan inklusif.
CPMK-2	Mampu merancang program pengembangan desa secara kolaboratif, inklusif, dan adaptif berbasis analisis pemetaan potensi serta kebutuhan masyarakat lokal.
CPMK-3	Mampu mengevaluasi keberlanjutan program desa dengan menunjukkan sikap tangguh serta komitmen belajar sepanjang hayat demi perbaikan mutu pembangunan desa.
CPMK-4	Mampu menganalisis potensi, masalah, dan kebutuhan pembangunan desa secara logis dan kritis menggunakan instrumen penilaian partisipatif sesuai regulasi yang berlaku.
CPMK-5	Mampu merancang dokumen program pembangunan desa secara sistematis dan kreatif berbasis inovasi tata kelola sumber daya lokal.
CPMK-6	Mampu berkolaborasi secara efektif dengan pemangku kepentingan desa dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pembangunan desa berbasis partisipasi masyarakat.
CPMK-7	Mampu mengembangkan kapasitas diri secara berkelanjutan melalui pemikiran kritis, evaluasi reflektif, dan pemanfaatan inovasi dalam tata kelola pengembangan program desa.

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4
CPMK-1	✔			
CPMK-2		✔		
CPMK-3		✔		
CPMK-4			✔	
CPMK-5			✔	
CPMK-6				✔
CPMK-7				✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✔	✔	✔													
CPMK-2				✔												
CPMK-3					✔	✔	✔									
CPMK-4								✔	✔							
CPMK-5										✔	✔					
CPMK-6												✔		✔		
CPMK-7													✔		✔	✔

Pustaka

Utama :

1. Eko, Sutoro. 2019. Demokratisasi dan Tata Kelola Desa Mandiri. Yogyakarta: IRE Press.
2. Solekhan, Moch. 2020. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Good Village Governance. Malang: Setara Press.
3. Huraerah, Abu. 2020. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung: Humaniora.
4. Nurcholis, Hanif. 2021. Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perdesaan. Jakarta: Rajawali Pers.
5. Gallent, Nick, Hamiduddin, Iqbal, dan Bianconi, Marcello. 2021. Rural Planning and Development. London: Routledge.

Pendukung :

1. Bintoro, Catur. 2022. Manajemen Perencanaan Program Pembangunan Desa: Pendekatan Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2021. Panduan SDGs Desa Terpadu. Jakarta: Kemendes PDTT.
3. Widodo, Joko. 2021. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi dalam Pembangunan Lokal. Malang: Media Nusa Creative.
4. Mardikanto, Totok dan Soebiato, Poerwoko. 2019. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
5. Scott, Mark, Gallent, Nick, dan Gkartzios, Menelaos. 2019. The Routledge Companion to Rural Planning. New York: Routledge.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	*Daring (online)*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Memahami konsep etika publik dan nilai kebangsaan dalam konteks tata kelola pembangunan desa.	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep, prinsip, dan dimensi etika publik dalam penyelenggaraan tata kelola pembangunan desa. 2. Ketepatan dalam menganalisis relevansi dan penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam mencegah penyimpangan tata kelola pembangunan desa.	Kriteria: Ketepatan konseptual, kedalaman analisis kritis, dan ketajaman argumentasi etis. Bentuk: Penilaian non-tes (analisis studi kasus dan partisipasi forum diskusi daring) serta tes tertulis (kuis pemahaman konsep).	Metode pembelajaran menggunakan Case-Based Learning dan collaborative learning melalui ceramah interaktif, telaah kasus pelanggaran etika aparatur desa, serta diskusi kelompok terarah.		1. Konsep, prinsip, dan dimensi etika publik dalam penyelenggaraan tata kelola pembangunan desa. 2. Nilai-nilai kebangsaan (Pancasila, gotong royong, dan integritas) serta penerapannya dalam pencegahan penyimpangan tata kelola desa.	2%
2	Menganalisis norma agama dan budaya lokal sebagai pijakan dalam penyusunan prioritas program desa.	1. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan memetakan norma agama serta tradisi/budaya lokal di desa. 2. Kedalaman analisis mengenai kesesuaian antara norma lokal dengan potensi serta permasalahan pembangunan desa. 3. Keakuratan dan kelogisan dalam merumuskan prioritas program desa berbasis pijakan nilai agama dan budaya lokal.	Kriteria: Ketepatan analisis, kedalaman argumentasi, keakuratan pemetaan data, dan keharmonisan usulan program dengan nilai lokal. Bentuk: Laporan studi kasus (rubrik penilaian analitis), lembar kerja analisis norma, dan presentasi kelompok.	Case-Based Learning (CBL) dan diskusi kelompok. Mahasiswa menganalisis kasus riil integrasi budaya/agama dalam pembangunan desa, merumuskan solusi, dan mempresentasikannya.		1. Konsep dasar dan teknik pemetaan norma agama serta tradisi/budaya lokal dalam konteks masyarakat desa. 2. Analisis kompatibilitas dan relevansi antara nilai-nilai lokal dengan perencanaan pembangunan desa. 3. Strategi integrasi nilai agama dan budaya lokal ke dalam penyusunan matriks prioritas program desa.	2%

3	Merumuskan usulan program desa yang menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi keadilan sosial.	1. Ketepatan mengidentifikasi potensi keberagaman dan masalah ketidakadilan sosial di tingkat desa. 2. Ketepatan menganalisis kebutuhan kelompok marjinal/rentan melalui pendekatan partisipatif. 3. Kualitas dan kelayakan rumusan usulan program desa yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan menghargai keberagaman.	Kriteria: Ketepatan analisis, relevansi usulan solusi, penerapan prinsip inklusivitas, serta kerapian sistematika penulisan. Bentuk: Non-tes (penilaian rubrik dokumen usulan program dan presentasi kelompok).	Project-Based Learning (PjBL), Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion), dan Studi Kasus.		1. Konsep dan prinsip keberagaman serta keadilan sosial dalam konteks pembangunan desa. 2. Metode analisis kebutuhan partisipatif berbasis kesetaraan dan inklusi sosial (Gender, Disability, and Social Inclusion/GEDSI). 3. Teknik perumusan dan penyusunan proposal program desa yang inklusif, akuntabel, dan berkeadilan sosial.	2%
4	Mampu menganalisis masalah dan kebutuhan pembangunan desa secara kolaboratif bersama partisipasi warga.	1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep, prinsip, dan metode analisis kebutuhan pembangunan desa secara partisipatif. 2. Kemampuan memetakan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan desa menggunakan teknik-teknik analisis pemetaan partisipatif. 3. Kedalaman analisis dalam merumuskan prioritas kebutuhan pembangunan desa berdasarkan hasil konsensus bersama warga dan analisis pemangku kepentingan.	Kriteria: Ketepatan analisis masalah, kedalaman argumentasi, kesesuaian instrumen partisipatif, dan kualitas kolaborasi kelompok. Bentuk: Laporan analisis masalah desa (proyek), presentasi hasil pemetaan (penilaian kinerja), dan kuis tertulis.	Project-Based Learning (PjBL) dan Case-Based Learning (CBL) yang dikombinasikan dengan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) dan simulasi teknik partisipatif.		1. Konsep dasar dan metode analisis kebutuhan pembangunan desa berbasis partisipasi warga (Participatory Rural Appraisal / PRA). 2. Teknik pemetaan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan desa melalui instrumen pengumpulan data kolaboratif. 3. Metode analisis pemangku kepentingan (stakeholder analysis) dan perumusan prioritas kebutuhan pembangunan desa.	2%
5	Mampu menyusun instrumen evaluasi kinerja dan dampak program desa secara transparan dan objektif.	1. Ketepatan dalam merumuskan parameter dan indikator evaluasi kinerja serta dampak program desa. 2. Keterampilan dalam menyusun draf instrumen evaluasi yang valid, reliabel, dan aplikatif. 3. Kemampuan mengintegrasikan prinsip transparansi dan objektivitas ke dalam prosedur penggunaan instrumen evaluasi.	Kriteria: Ketepatan perumusan indikator, validitas isi instrumen, kejelasan parameter ukur, serta tingkat objektivitas dan transparansi rubrik evaluasi. Bentuk: Penilaian produk portofolio (draf instrumen evaluasi program desa) dan rubrik penilaian kinerja presentasi.	Project-Based Learning (PjBL) dikombinasikan dengan metode diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) dan analisis studi kasus program desa.		1. Konsep, indikator, dan parameter evaluasi kinerja serta evaluasi dampak program desa. 2. Teknik perancangan dan penyusunan instrumen pengumpulan data evaluasi (kuesioner, panduan wawancara terstruktur, dan lembar observasi). 3. Prinsip dan mekanisme penjaminan transparansi, objektivitas, serta keterlibatan masyarakat dalam evaluasi program desa.	2%
6	Mampu memetakan hambatan pelaksanaan program serta menunjukkan ketangguhan dan pencarian solusi atas permasalahan di lapangan.	1. Ketepatan dalam memetakan dan mengategorikan hambatan pelaksanaan program desa berdasarkan kondisi lapangan. 2. Kejelasan dalam menunjukkan indikator ketangguhan dan adaptabilitas diri saat menghadapi dinamika permasalahan lapangan. 3. Keefektifan dan kelayakan formulasi solusi pemecahan masalah berbasis kearifan lokal dan partisipasi masyarakat.	Kriteria: Ketepatan analisis pemetaan masalah, ketajaman formulasi solusi, kerasionalan ide, dan kedalaman refleksi sikap tangguh. Bentuk: Laporan analisis studi kasus (penugasan individu), rubrik penilaian diskusi kelompok, dan lembar refleksi diri.	Case-Based Learning (CBL) dan Small Group Discussion secara daring.		1. Identifikasi dan Pemetaan Hambatan Pelaksanaan Program Desa (Struktural, Kultural, dan Operasional) 2. Manajemen Ketangguhan (Resilience) dan Adaptabilitas Pendamping Masyarakat Desa di Lapangan 3. Teknik Analisis Akar Masalah (Root Cause Analysis) dan Formulasi Solusi Partisipatif Program Desa	2%

7	Mampu mengekstraksi pembelajaran berkelanjutan dari hasil evaluasi sebagai bahan perbaikan kebijakan dan program desa di masa depan.	1. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan merumuskan poin-poin pembelajaran kunci (lessons learned) dari data hasil evaluasi program desa. 2. Kedalaman analisis dalam memetakan faktor-faktor kritis penyebab keberhasilan atau kegagalan program desa. 3. Kualitas dan kelayakan rekomendasi adaptasi kebijakan serta perbaikan program desa masa depan yang berorientasi keberlanjutan.	Kriteria: Ketajaman analisis kritis, ketepatan metodologis ekstraksi data evaluasi, kejelasan formulasi rekomendasi, dan kelayakan implementasi (menggunakan rubrik penilaian analitik). Bentuk: Non-tes berupa penugasan analisis studi kasus (policy brief) dan presentasi kelompok.	Case-Based Learning dan diskusi kolaboratif yang mencakup pengantar konseptual daring, analisis mandiri terhadap studi kasus evaluasi program desa riil, serta diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) untuk menyusun rekomendasi perbaikan program.	1. Menyusun dokumen ringkasan kebijakan (policy brief) perbaikan program desa secara berkelompok dan mengunggahnya ke forum diskusi LMS untuk dinilai melalui mekanisme peer-review.	1. Konsep dan teknik ekstraksi pembelajaran (lessons learned) serta praktik baik (best practices) dari laporan evaluasi program desa. 2. Analisis faktor determinan (pendorong dan penghambat) keberhasilan intervensi program pembangunan desa. 3. Formulasi rekomendasi perbaikan kebijakan desa dan strategi integrasinya ke dalam dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes).	15%
8	Menganalisis permasalahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara kritis menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA).	1. Ketepatan menjelaskan konsep dasar, prinsip, dan etika penerapan metode PRA dalam pembangunan desa. 2. Keahlian dalam menyusun dan merancang penggunaan instrumen teknik-teknik PRA sesuai karakteristik permasalahan desa. 3. Kedalaman analisis kritis dan ketepatan merumuskan rekomendasi pemecahan masalah pemberdayaan berdasarkan hasil sintesis data PRA.	Kriteria: Ketepatan konseptual, kelengkapan rancangan instrumen PRA, kedalaman analisis kritis, dan kejelasan argumentasi. Bentuk: Penilaian kinerja (simulasi instrumen PRA), penilaian lembar kerja (worksheet), dan laporan studi kasus analisis masalah desa.	Case-Based Learning (CBL) dan Small Group Discussion yang dikombinasikan dengan praktik simulasi penggunaan instrumen PRA.	1. UTS	1. Konsep dasar, prinsip utama, dan etika penerapan Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam konteks pembangunan desa. 2. Teknik-teknik dan instrumen PRA (Pemetaan Wilayah, Transect Walk, Diagram Venn, Kalender Musim, dan Bagan Alur Perubahan). 3. Teknik trianggulasi data dan perumusan rekomendasi pemecahan masalah pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hasil instrumen PRA.	20%
9	Menentukan prioritas kebutuhan program desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional.	1. Ketepatan dalam memetakan keselarasan antara isu strategis desa dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional. 2. Ketepatan dan objektivitas dalam mengaplikasikan metode penentuan prioritas (USG/Matriks Kriteria) terhadap daftar kebutuhan program desa. 3. Kualitas dan kelengkapan matriks rumusan prioritas program pembangunan desa yang terintegrasi dan aplikatif.	Kriteria: Ketepatan analisis sinkronisasi, validitas penerapan metode scoring/prioritas, dan kelogisan argumentasi penentuan program. Bentuk: Penilaian portofolio dokumen matriks prioritas program desa dan rubrik analitik presentasi studi kasus.	Case-Based Learning dan Diskusi Kelompok: Mahasiswa mengkaji dokumen perencanaan riil sebuah desa, membedah kesenjangan dengan kebijakan tingkat atas, lalu menyimulasikan penentuan prioritas menggunakan instrumen analisis secara kolaboratif.		1. Kerangka regulasi dan arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN & SDGs Desa), daerah (RPJMD), serta keterkaitannya dengan perencanaan desa (RPJMDes & RKPDes). 2. Metode dan teknik penentuan skala prioritas masalah serta kebutuhan pembangunan (metode Urgency, Seriousness, Growth [USG] dan Matriks Kriteria). 3. Penyusunan matriks sinkronisasi dan perumusan dokumen prioritas program desa berbasis kebutuhan lokal dan kebijakan makro.	2%
10	Merumuskan arah kebijakan dan program kerja desa yang inovatif berbasis pemanfaatan aset dan kearifan lokal.	1. Ketepatan dalam memetakan aset desa dan mengidentifikasi nilai-nilai kearifan lokal yang relevan. 2. Ketajaman analisis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan desa yang kontekstual. 3. Orisinalitas, kelayakan implementasi, dan inovasi dalam penyusunan draf program kerja desa.	Kriteria: Ketepatan analisis, orisinalitas ide program, kesesuaian kebijakan dengan potensi lokal, dan kelayakan implementasi. Bentuk: Penilaian portofolio (draf dokumen program kerja) dan rubrik penilaian kinerja presentasi kelompok.	Project-Based Learning (PjBL), diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion), dan studi kasus.		1. Konsep dan teknik pemetaan aset desa berbasis pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) serta inventarisasi kearifan lokal. 2. Formulasi arah kebijakan pembangunan desa yang responsif terhadap potensi dan tantangan lokal. 3. Desain dan penyusunan program kerja desa yang inovatif berbasis aset dan modal sosial-budaya setempat.	2%

11	Menyusun rancangan program pembangunan desa dalam kerangka logis yang sistematis sesuai siklus perencanaan tahunan desa (RKP Desa).	1. Ketepatan dalam menganalisis kesesuaian rancangan program dengan tahapan dan mekanisme siklus perencanaan RKP Desa. 2. Ketepatan dalam merumuskan matriks kerangka logis program desa yang mencakup hubungan kausalitas dari level aktivitas hingga tujuan akhir. 3. Kerapian, kelengkapan, dan kesistematisan penyusunan dokumen draf rancangan program desa sesuai format baku RKP Desa.	Kriteria: Ketepatan sistematika berpikir logis, kesesuaian terhadap regulasi perencanaan desa, kejelasan indikator kinerja program, dan kelengkapan dokumen. Bentuk: Penilaian kinerja berbasis rubrik analitik pada proyek penyusunan dokumen rancangan program dan portofolio tugas.	Project-Based Learning (PjBL) yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok terarah (FGD) dan studi kasus dokumen perencanaan desa.		1. Regulasi, tahapan, dan mekanisme penyusunan RKP Desa dalam siklus tahunan perencanaan desa. 2. Formulasi matriks kerangka kerja logis (Logical Framework Matrix) untuk program pembangunan desa (tujuan, luaran, aktivitas, indikator, dan risiko/asumsi). 3. Integrasi dan penyusunan draf dokumen usulan program desa berbasis kerangka logis ke dalam format standar rancangan RKP Desa.	2%
12	Mengidentifikasi peran serta dinamika interaksi antar pemangku kepentingan dalam tata kelola program pembangunan desa.	1. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan program desa berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya. 2. Ketepatan dalam menganalisis diferensiasi peran, wewenang, dan relasi fungsional antarpihak dalam tata kelola program pembangunan desa. 3. Ketajaman argumentasi dalam mendiagnosis dinamika interaksi, potensi gesekan/konflik, serta perumusan strategi kolaborasi antarpihak.	Kriteria: Ketepatan pemetaan konseptual, kedalaman analisis relasional, dan kejelasan argumentasi berbasis bukti/konteks desa. Bentuk: Lembar kerja pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder matrix) dan kuis daring uraian singkat.	Case-Based Learning (CBL) dan diskusi kelompok terarah, didahului dengan paparan konsep interaktif dan diakhiri dengan pleno pembahasan studi kasus implementasi program desa.		1. Tipologi dan teknik pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping) dalam pembangunan desa (Pemerintah Desa, BPD, lembaga adat, kelompok masyarakat, sektor swasta, dan NGO). 2. Pembagian peran, fungsi, wewenang, dan kepentingan masing-masing aktor dalam setiap tahapan program pembangunan desa. 3. Pola dinamika interaksi, relasi kuasa, manajemen konflik, dan strategi membangun kemitraan multipihak (collaborative governance) di tingkat desa.	2%
13	Menganalisis regulasi dan kebijakan terbaru terkait pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan.	1. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan landasan hukum serta hierarki regulasi pembangunan desa terbaru. 2. Kejelasan dan kedalaman analisis terhadap kebijakan strategis pemerintah (SDGs Desa) dalam konteks kemandirian desa. 3. Ketajaman analisis kritis mengenai dampak implementasi regulasi terhadap kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat desa.	Kriteria: Ketepatan analisis, kedalaman argumentasi, kesesuaian dengan regulasi yang berlaku, serta kesistematisan penyajian. Bentuk: Naskah analisis kebijakan (studi kasus) dan presentasi kelompok.	Case-Based Learning dan Small Group Discussion yang dikombinasikan dengan kuliah pengantar.		1. Landasan hukum dan hierarki regulasi pembangunan desa terbaru. 2. Kebijakan strategis pemerintah mengenai pembangunan desa mandiri dan berkelanjutan (SDGs Desa). 3. Evaluasi dampak implementasi regulasi terhadap tata kelola dan kemandirian ekonomi desa.	2%
14	Merancang model kemitraan kolaboratif antar-sektor untuk optimalisasi sumber daya dalam pengembangan program desa.	1. Ketepatan dalam mengidentifikasi peran serta kontribusi strategis masing-masing aktor lintas sektor dalam konteks desa. 2. Ketajaman analisis dalam mengidentifikasi potensi dan mensinergikan sumber daya lokal yang akan dioptimalkan. 3. Kelayakan, kejelasan, dan inovasi dalam merancang dokumen model alur kemitraan kolaboratif yang aplikatif untuk program desa.	Kriteria: Ketepatan analisis, kelayakan implementasi rancangan, kejelasan alur kerja sama, dan kerapian penyusunan dokumen kerja sama berdasarkan rubrik penilaian proyek. Bentuk: Portofolio proyek (dokumen rancangan model kemitraan) dan presentasi tugas kelompok.	Project-Based Learning (PjBL) yang dipadukan dengan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) dan studi kasus program kemitraan desa.		1. Konsep, prinsip, dan pemetaan pemangku kepentingan antar-sektor (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media) dalam pembangunan desa. 2. Strategi identifikasi, integrasi, dan optimalisasi sumber daya lokal melalui skema kerja sama lintas sektor. 3. Desain tata kelola dan penyusunan instrumen model kemitraan kolaboratif (kerangka kerja, alur koordinasi, dan mekanisme monitoring-evaluasi).	5%

15	Menyusun rancangan inovasi program desa yang adaptif terhadap dinamika perubahan sosial dan teknologi informasi.	1. Ketepatan dalam menganalisis dinamika perubahan sosial dan memetakan kebutuhan riil masyarakat desa. 2. Kesesuaian pemilihan serta integrasi instrumen teknologi informasi yang adaptif terhadap kapasitas desa. 3. Kelengkapan dan kelayakan implementasi dokumen rancangan inovasi program desa yang disusun.	Kriteria: Ketajaman analisis masalah, orisinalitas gagasan inovasi, kelayakan implementasi teknologi, dan sistematika penulisan dokumen. Bentuk: Penilaian proyek (dokumen rancangan proposal inovasi program desa) dan presentasi lisan.	Project-Based Learning (PjBL) dipadukan dengan studi kasus dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion).	1. Melakukan analisis komparasi studi kasus inovasi desa digital melalui forum diskusi daring di LMS. 2. Mengunggah draf proposal rancangan inovasi program desa adaptif pada repositori penugasan di LMS.	1. Konsep perubahan sosial pedesaan dan metode pemetaan masalah sosial kontemporer di desa. 2. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik serta ekonomi desa (konsep Smart Village). 3. Sistematika dan teknik penyusunan proposal inovasi program desa berbasis kebutuhan masyarakat.	15%
16	Melakukan evaluasi reflektif terhadap efektivitas program desa untuk merekomendasikan perbaikan tata kelola secara berkesinambungan.	1. Ketepatan dalam menganalisis efektivitas program desa menggunakan kerangka kerja evaluasi reflektif. 2. Kemampuan mengidentifikasi permasalahan tata kelola desa dan akar penyebab ketidakefektifan program secara objektif. 3. Kemampuan merumuskan rekomendasi perbaikan tata kelola desa yang realistis, solutif, dan berkesinambungan.	Kriteria: Ketepatan analisis evaluatif, kedalaman refleksi kritis, relevansi rekomendasi perbaikan, serta kejelasan argumentasi. Bentuk: Portofolio laporan evaluasi reflektif program desa dan presentasi kelompok.	Case-Based Learning (CBL) dan Small Group Discussion, didukung dengan pembelajaran mandiri secara asinkronus.	1. UAS	1. Kerangka kerja evaluasi reflektif dan indikator efektivitas program pembangunan desa. 2. Identifikasi masalah tata kelola desa dan analisis akar penyebab ketidakefektifan program. 3. Penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi perbaikan tata kelola desa secara berkesinambungan.	23%

SDGS (Sustainable Development Goals)



Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.